

**BELANJA PEGAWAI, INVESTASI, DAN PEMBAYARAN UTANG  
PEMERINTAH DAERAH TERHADAP FENOMENA *FLYPAPER EFFECT***

**Indah Aprilia<sup>1)</sup>, Maria Maria<sup>2)</sup>, Choiruddin Choiruddin<sup>3)</sup>**

<sup>1,2,3)</sup> Jurusan Akuntansi, Politeknik Negeri Sriwijaya

<sup>\*2)</sup> Coresponden author: [mariamardjuki@polsri.ac.id](mailto:mariamardjuki@polsri.ac.id)

**Abstrak**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh belanja pegawai, investasi pemerintah dan pembayaran utang pemerintah daerah terhadap *flypaper effect* pada pemerintah Kabupaten/kota di Sumatera Selatan. Penelitian ini menggunakan sampel jenuh terdiri dari 17 Kabupaten/kota. Jenis data adalah data sekunder yang diperoleh dari situs Badan Pemeriksa Keuangan RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Provinsi Sumatera Selatan untuk periode 2017-2021. Analisis data yang digunakan adalah analisis regresi logistik dengan pengolahan data menggunakan SPSS versi 22. *Flypaper effect* memberikan implikasi bahwa dominannya peran dana transfer terhadap pendapatan daerah dalam membiayai pengeluaran pemerintah daerah. Hasil yang diperoleh bahwa belanja pegawai berpengaruh positif dan signifikan terhadap *flypaper effect*, investasi pemerintah berpengaruh positif dan signifikan terhadap *flypaper effect*, dan pembayaran utang pemerintah daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap *flypaper effect*. Secara simultan belanja pegawai, investasi pemerintah, dan pembayaran utang berkontribusi sebesar 49,8%.

**Kata kunci:** Belanja Pegawai, Investasi Pemerintah, Utang Pemerintah Daerah, *Flypaper Effect*.

**Abstract**

*This research aims to determine the influence of employee spending, government investment and regional government debt payments on the flypaper effect on district/city governments in South Sumatra. This research uses a saturated sample consisting of 17 districts/cities. The type of data is secondary data obtained from the Indonesian Financial Audit Agency website for the Regional Government Financial Report (LKPD) of South Sumatra Province for the 2017-2021 period. The data analysis used is logistic regression analysis with data processing using SPSS version 22. The flypaper effect implies that the role of transfer funds is dominant in regional income in financing regional government expenditure. The results obtained show that employee spending has a positive and significant effect on the flypaper effect, government investment has a positive and significant effect on the flypaper effect, and regional government debt payments have a positive and significant effect on the flypaper effect. Simultaneously, personnel spending, government investment and debt payments contributed 49.8%.*

**Keywords:** *Personnel Expenditure, Government Investment, Regional Government Debt Payment, flypaper effect.*

**1. PENDAHULUAN**

Indonesia merupakan negara dengan perkembangan akuntansi sektor publik yang

cukup pesat. Setiap daerah di wilayah Republik Indonesia diberikan kewenangan oleh pemerintah pusat untuk mengatur

pemerintahannya. Pelimpahan kewenangan yang diberikan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah disebut otonomi daerah dan penyelenggaraan pemerintah daerah diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Menurut Undang - undang No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, otonomi daerah didefinisikan sebagai hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Otonomi daerah ini juga dilakukan agar kesejahteraan yang didapat oleh seluruh masyarakatnya dapat merata atau tidak hanya sebagian orang saja yang merasakan kesejahteraan. Namun, tujuan utama dari dilakukannya sistem otonomi daerah ini adalah untuk meningkatkan pelayanan publik (*publik service*) serta memajukan perekonomian daerah. Pemerintah daerah memiliki hak otonomi dalam mengelola sumber ekonomi daerah secara mandiri dan bertanggung jawab yang hasilnya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah. Otonomi daerah yang sudah berjalan merupakan kesempatan yang sangat baik bagi pemerintah daerah untuk membuktikan kemampuannya dalam melaksanakan kewenangan yang menjadi hak daerah. Maju atau tidaknya suatu daerah ditentukan oleh kemampuan dan kemauan daerah itu sendiri dalam melaksanakan otonomi daerah.

Pemerintah daerah juga memanfaatkan Dana Alokasi Umum (DAU) yang merupakan bagian dari salah satu dana perimbangan untuk membiayai belanja daerahnya. Belanja daerah menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri (permendagri) No.21/2011 tentang pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dikelompokkan ke dalam belanja langsung dan belanja tidak langsung. Belanja langsung terdiri dari belanja bunga, pegawai, bantuan sosial, subsidi, hibah bantuan keuangan dan belanja tak terduga. Belanja tidak langsung terdiri dari belanja pegawai, barang jasa dan belanja modal.

Jika dilihat dari APBD setiap pemerintah daerah, dana perimbangan

berkontribusi cukup besar terhadap pendanaan di daerah. Kebijakan penggunaan semua dana tersebut diserahkan kepada pemerintah daerah. Transfer pemerintah pusat berupa DAU diberikan dalam rangka pemerataan kemampuan keuangan antar daerah dan untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.

Permasalahan yang timbul dalam DAU terletak pada perbedaan pemahaman fungsinya oleh pemerintah pusat maupun daerah. Pemerintah pusat memberikan dana ini dimaksudkan untuk pemerataan keuangan antar daerah sedangkan pemerintah daerah menganggap pemberian dana ini untuk mencukupi kebutuhan daerahnya. Perbedaan pemahaman ini menyebabkan belanja daerah lebih banyak dilakukan oleh pemerintah daerah dengan menggunakan dana transfer dari DAU dari pada Pendapatan Asli Daerah (PAD) atau dikenal dengan istilah "*Flypaper Effect*".

Disisi lain, belanja pegawai yang merupakan bagian dari belanja daerah, besarnya akan berimbas pada pengeluaran pemerintah daerah. Hal ini tidak sebanding dengan PAD yang masih kurang memadai dalam menutup pengeluaran pemerintah daerah. Pengeluaran belanja pegawai diindikasikan menyerap dana perimbangan dari pemerintah pusat yang cukup tinggi, maka diduga belanja pegawai menjadi salah satu penyebab terjadinya *flypaper effect* di Pemerintah Daerah (Burhanuddin, 2012).

Faktor lainnya yang dapat memengaruhi terjadinya *flypaper effect* adalah investasi pemerintah daerah. Investasi pemerintah daerah dapat dianggarkan apabila jumlah investasi yang akan dianggarkan dalam tahun anggaran bersangkutan telah ditetapkan dalam peraturan daerah tentang penyertaan modal investasi. Besarnya penyertaan modal investasi daerah dapat berimbas pada pengeluaran pemerintah daerah.

Selain penerimaan dari pemerintah pusat yang berbentuk dana perimbangan, pemerintah daerah juga melakukan pinjaman kepada pihak luar dalam bentuk utang. Besarnya jumlah utang dapat memberikan dampak bagi pengeluaran pembayaran pokok utang pemerintah

daerah. Oleh karena itu pengeluaran untuk pembayaran pokok utang secara tidak langsung dapat berhubungan dengan penyerapan dana transfer dari pemerintah pusat.

Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan menjelaskan mengenai pembayaran kembali pinjaman yang berbunyi “Dalam hal daerah tidak memenuhi kewajiban membayar pinjamannya kepada pemerintah, kewajiban pembayaran pinjaman tersebut diperhitungkan dengan DAU dan/atau dana bagi hasil yang menjadi hak daerah tersebut” (UU No 33 Tahun 2004).

Berdasarkan latar belakang permasalahan, maka dapat dirumuskan perumusan masalah dalam penelitian ini yaitu :

1. Bagaimana pengaruh belanja pegawai, investasi pemerintah dan pembayaran utang pemerintah daerah secara parsial terhadap *flypaper effect*.
2. Bagaimana pengaruh belanja pegawai, investasi pemerintah dan pembayaran utang pemerintah daerah secara simultan terhadap *flypaper effect*.

Tujuan dari penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui pengaruh belanja pegawai, investasi pemerintah, dan pembayaran utang pemerintah daerah secara parsial terhadap *flypaper effect*.
2. Untuk mengetahui pengaruh belanja pegawai, investasi pemerintah, dan pembayaran utang pemerintah daerah secara simultan terhadap *flypaper effect*.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi pemerintah kabupaten/kota di Sumatera Selatan dan menjadi bahan pertimbangan dalam mempertanggung jawabkan dana publik yang telah dipercayakan untuk dikelola dengan baik sehingga dapat lebih meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Peneliti tertarik untuk menganalisis variabel-variabel yang mempengaruhi *flypaper effect* di daerah dan kota di Provinsi Sumatera Selatan tahun 2017-2021 berdasarkan hasil dari berbagai penelitian sebelumnya dan kejadian saat ini.

## 2. TELAHAH LITERATUR

### Teori Keagenan

Teori agensi menjabarkan hubungan antara pihak stakeholder atau principal dengan agent, dimana prinsipal adalah pihak yang memberikan mandat kepada agen. Teori ini mengasumsikan bahwa masing-masing individu semata-mata termotivasi oleh kepentingan dirinya sendiri sehingga menimbulkan konflik kepentingan antara prinsipal dan agen. Prinsipal mengontrak agen untuk melakukan pengelolaan sumber daya dalam perusahaan dan berkewajiban untuk memberikan imbalan kepada agen sedangkan agen berkewajiban melakukan pengelolaan sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan dan bertanggungjawab atas tugas yang dibebankan kepadanya (Jensen dan Meckling, 1976). Lane (2000) menyatakan bahwa hubungan prinsipal dan agen terjadi apabila tindakan yang dilakukan seseorang memiliki dampak pada orang lain atau ketika seseorang sangat tergantung pada tindakan orang lain. Pengaruh atau ketergantungan ini diwujudkan dalam kesepakatan-kesepakatan dalam struktur institusional pada berbagai tingkatan, seperti norma perilaku dan konsep kontrak antara keduanya.

### *Flypaper Effect*

Istilah *flypaper effect* diperkenalkan pertama kali oleh Courant, Gramlich, dan Rubinfeld (1979) untuk mengartikulasikan pemikiran Arthur Okun (1930) yang menyatakan “money sticks where it hits”. Sejauh ini, belum ada padanan kata “*flypaper effect*” dalam bahasa Indonesia sehingga kata ini dituliskan sebagaimana adanya tanpa diterjemahkan. Beberapa peneliti menemukan respon pemerintah daerah berbeda untuk transfer dan pendapatan sendiri (seperti pajak), ketika penerimaan daerah berasal dari transfer, maka stimulasi atas belanja yang ditimbulkannya berbeda dengan stimulasi yang muncul dari pendapatan daerah (terutama pajak daerah). Vegh dan Vuletin (2015) menyatakan bahwa *flypaper effect* secara luas didokumentasikan sebagai peraturan dalam keuangan publik yang memegang kecenderungan pemerintah daerah untuk menghabiskan dana transfer

lebih tinggi dari pada menghabiskan pendapatannya sendiri.

### **Pendapatan Asli Daerah (PAD)**

PAD menurut UU No. 23 Tahun 2014 adalah pendapatan daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Kemandirian suatu daerah dapat diukur dari penerimaan PAD diperoleh tiap kabupaten/kota setiap tahunnya. Semakin meningkat PAD yang diperoleh dibandingkan dengan dana transefer yang diterima dari pusat maka semakin mandiri pula daerah tersebut.

### **Dana Alokasi Umum**

Permasalahan yang timbul dalam DAU terletak pada perbedaan pemahaman fungsinya oleh pemerintah pusat maupun daerah. Pemerintah pusat memberikan dana ini dimaksudkan untuk pemerataan keuangan antar daerah sedangkan pemerintah daerah menganggap pemberian dana ini untuk mencukupi kebutuhan daerahnya.

### **Belanja Pegawai**

Belanja pegawai dipergunakan untuk menjalankan atau menyelenggarakan kegiatan pengelolaan pemerintah daerah. Besarnya jumlah dana pegawai berimbas pada pengeluaran pemerintah daerah yang semakin besar pula. Hal ini tidak sebanding dengan PAD yang masih kurang memadai dalam menutup pengeluaran pemerintah daerah.

### **Investasi Pemerintah**

Investasi adalah aset yang memiliki manfaat ekonomi yang nantinya dapat meningkatkan kemampuan pemerintah dalam rangka pelayanan publik khususnya masyarakat. Besarnya penyertaan modal investasi daerah berimbas pada pengeluaran pemerintah daerah. Semakin besar alokasi dana untuk investasi maka semakin besar juga penyebab suatu daerah mengalami fenomena flypaper effect karena dana yang digunakan untuk pembiayaan investasi tersebut diduga berasal dari dana transfer pemerintah pusat.

### **Pembayaran Utang**

Berdasarkan Permendagri No. 64 tahun 2013, kewajiban adalah utang yang

timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah daerah. Semakin besar alokasi dana untuk pembayaran utang maka semakin besar juga penyebab suatu daerah mengalami fenomena flypaper effect. Ini karena pembayaran utang juga baru bisa dilakukan apabila pemerintah mendapat surplus dan pembayaran utang termasuk pembiayaan.

### **3. METODE PENELITIAN**

Jenis penelitian yang dilakukan pada penelitian ini yaitu penelitian asosiatif kausal dan menggunakan metode kuantitatif. Data yang digunakan pada penelitian ini adalah data sekunder. Penelitian ini menggunakan data Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Tahun 2017-2021 yang diperoleh melalui situs Badan pemeriksa Keuangan RI (BPK RI). Penelitian dilakukan pada bulan Maret sampai dengan bulan Juli 2023. Dengan menggunakan variabel independen belanja pegawai (X1), investasi pemerintah (X2), dan pembayaran utang pemerintah daerah (X3) serta variabel dependen *flypaper effect* (Y). Populasi penelitian dilakukan pada 17 Kabupaten/Kota di Sumatera Selatan periode 2017-2021. Tabel 1 menampilkan 17 Kabupaten/kota di Sumatera Selatan.

Tabel 1

Daftar Kabupaten/Kota Sumatera Selatan

No	Nama Kabupaten/kota di Sumatera Selatan
1.	Kota Palembang
2.	Kota Prabumulih
3.	Kota Lubuk Linggau
4.	Kota Pagar Alam
5.	Kabupaten Musi Banyuasin
6.	Kabupaten Ogan Komering Ulu
7.	Kabupaten Muara Enim
8.	Kabupaten Lahat
9.	Kabupaten Musi rawas
10.	Kabupaten Ogan Komering Ilir
11.	Kabupaten Banyuasin
12.	Kabupaten Ogan Komering Ulu selatan
13.	Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur
14.	Kabupaten Ogan Ilir
15.	Kabupaten Musi Rawas Utara

16.	Kabupaten Penukal Abab Ilir
17.	Kabupaten Empat Lawang

Sumber: <https://www.sumsel.bpk.go.id>

Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah sampel jenuh. Sampel dalam penelitian ini adalah LKPD 17 Kabupaten/kota selama 5 Tahun dari 2017-2021, sehingga total sampel dalam penelitian ini adalah 85.

Teknik analisis data dalam penelitian ini adalah analisis regresi logistik biner. Tujuan dari teknik analisis regresi logistik biner adalah untuk mengetahui adakah pengaruh dari variabel independent terhadap variabel dependen.

#### 4. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

##### Hasil Penelitian

Tabel 2 menampilkan hasil analisis menggunakan regresi logistik.

Tabel 2

##### Hasil Pengujian Regresi Logistik

Sumber : Output SPSS, 2023

Berdasarkan tabel 2 mencantumkan nilai konstanta untuk setiap variabel adalah sebagai berikut: variabel Belanja Pegawai (X1) memiliki kemiringan konstan sebesar 0,008, nilai variabel Investasi Pemerintah (X2) sebesar 0,184, dan variabel Pembayaran Utang (X3) memiliki kemiringan konstan sebesar 0,021. Berikut bentuk model regresi linier berganda:

$$\text{Ln } Y = -3,986 + 0,008 X1 + 0,184 X2 + 0,021 X3 + e$$

Uji parsial pada tabel 2 menunjukkan pengaruh masing-masing variabel yaitu:

Belanja pegawai (X1) berpengaruh signifikan (0,000) lebih kecil dari (0,05). Investasi pemerintah (X2) berpengaruh cukup besar terhadap *flypaper effect*, dengan nilai (0,040) lebih kecil dari (0,05). Pembayaran utang berpengaruh signifikan dengan nilai sebesar (0,029) lebih kecil dari (0,05).

Tabel 3 Uji Koefisien Determinasi

Model Summary			
Step	-2 Log likelihood	Cox & Snell R Square	Nagelkerke R Square
1	72,054 <sup>a</sup>	,353	,489

a. Estimation terminated at iteration number 7 because parameter estimates changed by less than ,001.

Berdasarkan tabel 3 nilai *nagelkerke R Square* mendekati nol menunjukkan kemampuan dalam menjelaskan variabel dependen sangat terbatas, sedangkan nilai *nagelkerke R Square* mendekati satu menunjukkan variabel independen mampu untuk memberikan semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variabilitas variabel dependen (Ghozali, 2018). Hasil

Variables in the Equation					
		B	S.E.	Sig.	Exp(B)
Step 1 <sup>a</sup>	Belanja Pegawai	,008	,002	,000	1,008
	Investasi Pemerintah	,184	,090	,040	1,202
	Pembayaran Utang	,021	,010	,029	1,021
	Constant	-3,986	1,109	,000	,019

yang diperoleh dapat digunakan untuk melihat kemampuan variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen melalui nilai Cox and Snell R Square dan Nagelkerke R Square sebesar (0,489) yang artinya bahwa nilai tersebut lebih besar daripada 0,05 yang menunjukkan bahwa variabilitas variabel dependen dapat dijelaskan dengan variabel independen sebesar 48,9%.

Tabel 4  
Omnibus Test of Model

Omnibus Tests of Model Coefficients				
		Chi-square	df	Sig.
Step 1	Step	37,054	3	,000
	Block	37,054	3	,000
	Model	37,054	3	,000

Sumber: Output SPSS, 2023

Berdasarkan tabel 4 bahwa selisih -2 Log Likelihood pada block 0 dan block 1 adalah sebesar 37,054 dengan signifikansi sebesar 0,000 yang berarti nilai tersebut lebih kecil 0,05 atau bermakna penambahan variabel bebas memberikan pengaruh yang nyata terhadap model (model yang dihipotesiskan fit.)

### Pembahasan

Belanja pegawai dipergunakan untuk menjalankan atau menyelenggarakan kegiatan pengelolaan pemerintah daerah. Besarnya jumlah dana pegawai berimbas pada pengeluaran pemerintah daerah yang semakin besar pula. Hal ini tidak sebanding dengan PAD yang masih kurang memadai dalam menutupi pengeluaran pemerintah daerah.

Belanja pegawai memiliki koefisien sebesar 0,008 dengan nilai signifikansi 0,000 yang lebih besar dari 0,050. Dapat disimpulkan bahwa belanja pegawai pemerintah kabupaten/kota di Sumatera Selatan berpengaruh terhadap *flypaper effect*. Hal ini sejalan dengan penelitian Prihatami (2017) tentang pengaruh belanja pegawai terhadap fenomena *flypaper effect*, menunjukkan hasil bahwa belanja pegawai berpengaruh terhadap fenomena *flypaper effect*. Belanja pegawai merupakan bagian dari belanja daerah, yang pengalokasian anggarannya terbesar. Hal ini menyebabkan pemerintah lebih memerlukan dana yang lebih banyak lagi dan lebih sering mengandalkan dana perimbangan karena pendapatan daerah yang masih kecil. Besarnya jumlah dana pegawai berimbas pada pengeluaran pemerintah daerah yang semakin besar pula.

Besarnya penyertaan modal investasi daerah berimbas pada pengeluaran pemerintah daerah. Investasi baru dapat dilakukan apabila kewajiban dasar pemerintah daerah telah terlaksana. Jika pemerintah daerah mendapatkan surplus terdapat kemungkinan meningkatnya investasi daerah. Surplus defisit didapat dari pendapatan daerah dikurangi belanja daerah. Mayoritas pendapatan daerah masih

berasal dari dana transfer pemerintah pusat. Semakin besar alokasi dana untuk investasi maka semakin besar juga penyebab suatu daerah mengalami fenomena *flypaper effect* karena dana yang digunakan untuk pembiayaan investasi tersebut berasal dari dana transfer pemerintah pusat. Adanya kelabilan pada penambahan jumlah investasi yang sangat signifikan menjadi salah satu penyebab fenomena *flypaper effect* pemerintah daerah.

Berdasarkan *variables in the equation* (tabel 1) variabel investasi pemerintah memiliki koefisien sebesar 0,184 dengan nilai signifikansi 0,040 yang lebih kecil dari 0,050. Dapat disimpulkan bahwa investasi pemerintah kabupaten/kota provinsi Sumatera Selatan berpengaruh signifikan terhadap *flypaper effect*. Hal ini tidak sejalan dengan penelitian Fikki (2019), investasi pemerintah tidak berpengaruh terhadap fenomena *flypaper effect* karena koefisien investasi pemerintah yang menunjukkan nilai negatif yang berarti jika investasi pemerintah naik, maka akan menyebabkan *flypaper effect* akan turun.

Pembayaran utang merupakan pembayaran yang digunakan untuk menganggarkan pembayaran kewajiban atas pokok utang yang dihitung berdasarkan perjanjian pinjaman jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang. Pengeluaran untuk pembayaran pokok utang pemerintah daerah ada hubungan secara tidak langsung terhadap penyerapan dan transfer dari pemerintah pusat. Semakin besar alokasi dana untuk pembayaran utang maka semakin besar juga penyebab suatu daerah mengalami fenomena *flypaper effect*. Ini karena DAU terlalu banyak dianggarkan pada pembayaran utang pemerintah daerah sehingga ketergantungan pada dana transfer yang menyebabkan terjadinya fenomena *flypaper effect*.

Berdasarkan penelitian ini dilihat pada tabel 1 *variables in the equation* pembayaran utang memiliki koefisien sebesar 0,021 dengan nilai signifikansi 0,029 yang lebih kecil dari 0,050. Hasil ini

menunjukkan bahwa pembayaran utang pemerintah daerah menjadi salah satu faktor yang menyebabkan terjadinya *flypaper effect* pada kabupaten/kota di Sumatera Selatan. Adanya ketidakstabilan pada pengurangan jumlah utang yang sangat signifikan maka pembayaran pokok utang menjadi salah satu penyebab fenomena *flypaper effect* di pemerintah daerah.

Dapat dilihat pula bahwa selisih -2 Log Likelihood pada block 0 dan block 1 adalah sebesar 37.054 dengan signifikansi sebesar 0,000 yang berarti nilai tersebut lebih kecil 0,05. Dengan demikian, belanja pegawai, investasi pemerintah dan pembayaran utang pemerintah daerah memiliki pengaruh yang signifikan terhadap *flypaper effect*.

## 5. KESIMPULAN

Penulis menarik kesimpulan berikut tentang temuan dalam penelitian ini:

1. Belanja pegawai berpengaruh positif dan signifikan terhadap *flypaper effect*. Hal ini menunjukkan bahwa besarnya jumlah dana pegawai berimbas pada pengeluaran pemerintah daerah yang semakin besar pula. Hal ini tidak sebanding dengan PAD yang masih kurang memadai dalam menutup pengeluaran pemerintah daerah.
2. Investasi pemerintah berpengaruh positif dan signifikan terhadap *flypaper effect*. Hal ini menunjukkan besarnya penyertaan modal investasi daerah berimbas pada pengeluaran pemerintah daerah. Semakin besar alokasi dana untuk investasi maka semakin besar juga penyebab suatu daerah mengalami fenomena *flypaper effect* karena dana yang digunakan untuk pembiayaan investasi tersebut berasal dari dana transfer pemerintah pusat.
3. Pembayaran utang pemerintah berpengaruh positif dan signifikan terhadap *flypaper effect*. Hal ini menunjukkan pengeluaran untuk pembayaran pokok utang pemerintah daerah ada hubungan secara tidak langsung terhadap penyerapan dana transfer dari pemerintah pusat. Adanya kelabilan pada pengurangan jumlah utang yang sangat signifikan menjadi salah satu penyebab fenomena *flypaper effect* pemerintah daerah.
4. Belanja pegawai, belanja modal, investasi pemerintah, dan pembayaran utang pemerintah daerah berpengaruh positif signifikan terhadap *flypaper effect*. Hal ini menunjukkan bahwa penambahan variabel bebas memberikan pengaruh yang nyata terhadap *flypaper effect*.

## DAFTAR PUSTAKA

- Fenomena Flypapper Effect (Studi Empiris Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Barat 2014). *E-Jurnal Universitas Bung Hatta* Vol.4 No.1 2014.
- Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, 2021.  
<https://www.bpk.go.id>
- Burhanuddin, Ahmad. (2012) Pengaruh Belanja Pegawai, Investasi
- Ghozali, I. 2018, *Analisis Multivariat dan Ekonometrika dengan Eviews 10*. Semarang: Badan Penerbit Univeritas Diponegoro.
- Pemerintah Dan Pembayaran Utang Pemerintah Daerah Terhadap Fenomena Flypaper Effect. *Accounting Analysis Journal*, Vol.1 No.1 (2012).
- Jensen, M. C. (1976). Reflections on the state of Accounting Research and the Regulation of Accounting.
- Lane, Jan-Erik. 2000. *The Public Sector- Concepts, Models, and Approaches*. London: SAGE Publications.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 *Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah*.
- Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 *tentang Penyusunan Rencana Kerja Anggaran*.
- Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 *Tentang Standar Akuntansi Pemerintah*.

- Priliatami, I. (2017). Pengaruh Belanja Pegawai, Belanja Modal, Dan Pembayaran Utang Pemerintah Terhadap Fenomena Flypaper Effect (Universitas Negeri Jakarta). Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009.
- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 *Tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.*
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 *Tentang Pemerintah daerah.*
- Vegh, Carlos A., and Guillermo Vuletin. 2015. "How is tax policy conducted overr the business cycle?" *American Economic Journal: economic policy*, 7 (3):327-70.